



## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pembangunan jangka menengah tahap ketiga atas pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, yang merupakan kristalisasi, komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan adalah “Kalimantan Selatan 2025 Maju Dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan Dan Jasa Berbasis Agroindustri” dengan misi:

1. **Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM**, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.
2. **Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan**, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.
3. **Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan**, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan
4. **Mendorong pengelolaan SDA secara efisien**, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
5. **Menciptakan taat asas dan tertib hukum**, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama.

Penyusunan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan RPJMN. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu: **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**, yang ditempuh dengan 7 misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya



maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) dalam RPJMN, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan



jangka menengah nasional, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan berikut ini.

### 5.1 Visi Pembangunan

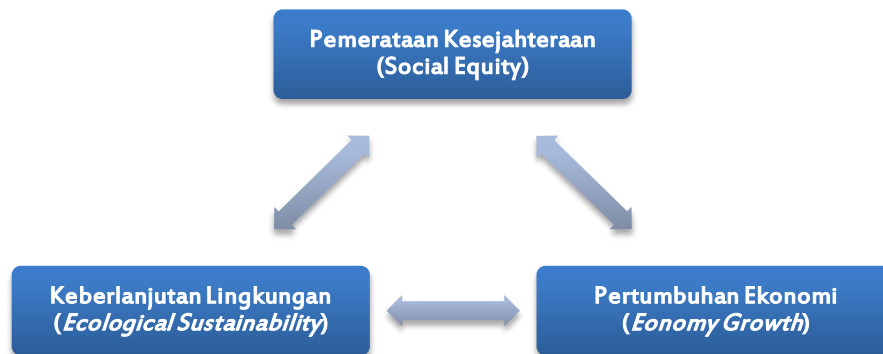
Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2016 – 2021 yaitu: **“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”**.

Visi tersebut secara umum mengandung pengertian “Pembangunan Biru (blue development) Menuju Kedaulatan dan Kemapanan Berkelanjutan”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembangunan Biru (*blue development*) adalah pembangunan yang memperhatikan keberadaan sumberdaya, mempertahankan keragaman (biodiversity), inovasi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan (konservasi) dan meningkatkan jasa-jasa lingkungan.
2. Ekonomi biru (*blue economy*) yaitu sistem ekonomi berbasis inovasi yang memanfaatkan SDA secara produktif dan efisien, tidak menghasilkan limbah dan emisi; dan pada saat yang sama mampu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan tidak memerlukan biaya tinggi.
3. Kedaulatan dan Kemampuan Berkelanjutan; yaitu Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memperhatikan keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi (*economy growth*), sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan (*social equity*) dan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan (*ecological sustainability*) yang dikenal dengan *the living triangle*.



**Gambar 5. 1 Keterkaitan 3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan**  
(*Sustainable Development*)



Didalam Ekonomi Biru (*blue economy*) mengandung beberapa prinsip antara lain: (1) Pemerataan distribusi kesejahteraan yaitu mengupayakan distribusi kesejahteraan yang adil didalam suatu daerah untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin dan mencapai keadilan sosial serta ekonomi yang berkelanjutan; (2) Ekuitas dan keadilan ekonomi; (3) Ekuitas antar generasi; (4) Pendekatan pencegahan yaitu melalui identifikasi resiko terhadap lingkungan, dampak lingkungan dan mencegah degradasi lingkungan; (5) Hak untuk berkembang untuk semua komponen; (6) Adanya kerjasama internasional; (7) Informasi, partisipasi dan akuntabilitas; (8) Adanya Konsumsi dan produksi berkelanjutan; (9) Strategis, terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan perencanaan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan; (10) Mendefinisikan kembali kesejahteraan; (11) Kesetaraan gender; (12). Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi dari setiap bagian dari lingkungan.

4. Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan dan energi yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
  - a. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai

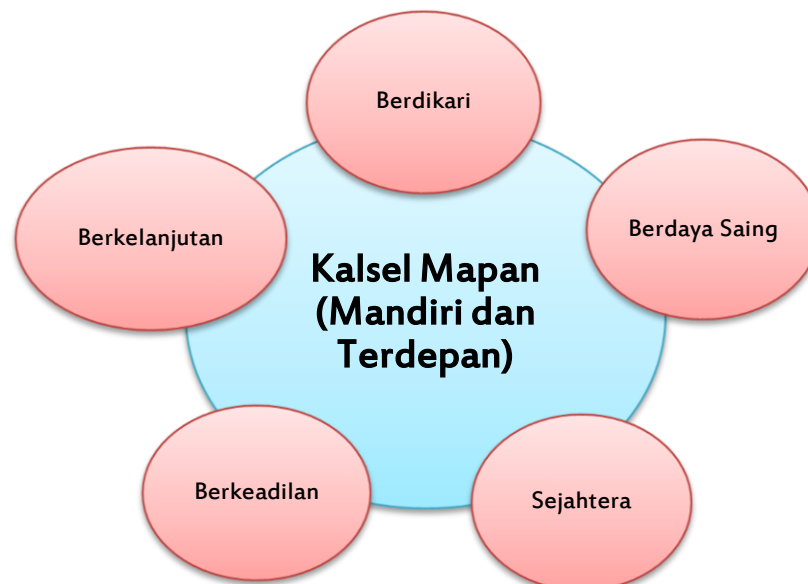


di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

- b. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- c. Ketahanan pangan adalah suatu upaya meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan diversifikasi pangan, mengembangkan kelembagaan pangan, dan mengembangkan usaha pengelolaan pangan.

Beberapa prinsip pembangunan yang memperhatikan aspek kesejahteraan, berdaya saing, berdikari, berkeadilan dan berkelanjutan yang merupakan aktualisasi dari visi Kalimantan Selatan MAPAN (Mandiri dan Terdepan) digambarkan dalam Gambar 5.2.

**Gambar 5. 2** Elemen-elemen Pembangunan



Visi **“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing”** tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil). Kondisi Pembangunan



yang mapan di suatu daerah/wilayah, adalah pembangunan yang dapat memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa mengabaikan untuk generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. dengan demikian pembangunan yang mapan terkait dengan penekanan pada daya tampung dan daya dukung. Dengan demikian definisi di atas dapat dilihat dari faktor lingkungan, masa depan dan keadilan, sedangkan aspek-aspek kemapanan tersebut dapat dilihat dari segi: Kemapanan Ekonomi, kemapanan Ekologi, Kemapanan Sosial, Kemapanan Budaya, Kemapanan Pertanian, Kemapanan dalam berpolitik, Kemapanan dalam kehidupan beragama, dan sebagainya. Diharapkan Kemandirian dan keterdepanan dimaksud, akhirnya akan berdampak terhadap perwujudan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Mapan yang terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu MANDIRI dan TERDEPAN, yang mengandung pengertian:

1. **MANDIRI:** Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup, berlandaskan kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara ekonomi dan sosial, yang dapat dilihat a.l.: Kemandirian dari segi pembiayaan pembangunan, Kemandirian dari segi ketahanan pangan, Kemandirian dari segi ketahanan energi.
2. **TERDEPAN,** Kata terdepan mempunyai arti paling muka, paling depan, terdahulu atau utama. Kata ini menunjukkan semangat bagaimana Kalsel yang selama ini di anominikan dengan kata (kalah selalu), untuk bangkit menjadi salah satu provinsi termaju di regional Kalimantan, bahkan juga tentunya di harapkan secara nasional. Untuk ini diperlukan adanya semangat dan kerja yang luar biasa, dari seluruh komponen aparat pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat lainnya untuk secara bersama-sama mendukung. Terdepan dapat diartikan dan dilihat dengan tingkat pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah yang dapat diraih minimal mendekati rata-rata nasional, dan bahkan diharapkan kedepannya bisa berada di atas rata-rata nasional.

Selanjutnya untuk mendukung Kalimantan Selatan yang Mapan (Mandiri dan Terdepan) dimaksud, terdapat lima elemen utama pembangunan yaitu aspek



berdikari, aspek berdaya saing, aspek sejahtera, aspek berkeadilan, dan aspek berkelanjutan. Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

### **1. Berdikari**

Berdikari merupakan kemampuan daerah untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, terutama dalam hal penyediaan kebutuhan pangan, energi, air bersih, serta pendidikan, kesehatan. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini kemiskinan dan pengangguran adalah hal yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah harus mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat dengan alat ukur Mandiri Pengangguran (TPT), kemiskinan (jumlah dan tingkat kemiskinan) dan pemerataan pembangunan (Gini Rasio).

### **2. Berdaya Saing**

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Provinsi Kalimantan Selatan pada periode ketiga RPJPD ingin mengembangkan tentang agrobisnis, hal ini dikarenakan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu lumbung padi Nasional. Agrobisnis merupakan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Agrobisnis terbagi dalam dua bidang yaitu peternakan dan budidaya. Di bidang peternakan misalnya, terdapat hewan-hewan yang bisa diambil manfaatnya, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik, bebek dan lain-lain. Sementara pada bidang budidaya, banyak jenis tanaman pangan yang dapat dibudidayakan, seperti durian, jeruk, rambutan, pepaya, dan lain-lain. Upaya pengembangan usaha pertanian dan turunannya berorientasi pada peningkatan produktivitas, kreatifitas dan inovatif, dengan memanfaatkan teknologi dan kualitas SDM masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang diukur dari pengeluaran konsumsi rumah tangga baik pangan dan non pangan.



### **3. Berkeadilan**

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang merata, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dikarenakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan masih terpusat di kota Banjarmasin, maka pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan belum dapat dikatakan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Povinsi Kalimantan Selatan. untuk itu wilayah lainnya juga perlu dikembangkan eselanjutnya walaupun sektor pertanian mendominasi roda perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi sektor lainnya tetap juga dikembangkan agar dapat menyerap tenaga kerja dan berperan serta dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, yang ditunjang dengan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di semua bidang pembangunan

### **4. Sejahtera**

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah didalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan landasan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan. Indikator tersebut adalah terjadi perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat Inflasi terutama untuk kelompok makanan, gagalnya kebijakan dan program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat ditundanya atau dihilangkannya program sosial.

### **5. Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Hal tersebut diatas terkandung dua gagasan penting yaitu gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin yang harus diberi prioritas utama dan gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebututuhan kini dan hari depan.





## 5.2 Misi Pembangunan

Berdasarkan visi dijelaskan sebelumnya, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;**
- 2. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;**
- 3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal;**
- 4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya;**
- 5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.**

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

### **1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil**

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah terkait dengan keunggulan sumber daya manusia. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global, sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Selatan yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kemandirian merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia unggul, sedangkan ketaqwaan merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia agamis.



## **2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik**

Birokrasi pemerintahan daerah tidak hanya menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi.

## **3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal**

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Kalimantan Selatan sebagai Provinsi yang masih memegang teguh kearifan lokal sebagai identitas wilayah, kiranya perlu mengembangkan kebudayaan wilayah sehingga menjadi destinasi yang menarik. Walaupun ada upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke generasi, tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis dan konsumtif.

Kearifan lokal yang menuntun masyarakat kedalam hal pencapaian kemajuan dan keunggulan, etos kerja, serta keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial. Dalam hal keharmonisan sosial dan budaya, hampir semua budaya di Indonesia mengenal prinsip gotong royong dan toleransi.



#### **4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya**

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Provinsi Kalimantan Selatan dalam perkembangannya perlu mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya dengan membangun infrastruktur wilayah yang merata dan berkeadilan.

#### **5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan**

Ketimpangan pembangunan antarwilayah sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah dan memiliki dampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah Rasio Gini, dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya.

Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan sumber daya yang dimiliki. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kualitas lingkungan hidup merupakan keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah yang diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan tiga kriteria, yakni kualitas air, kualitas udara, dan luas tutupan lahan.



### 5.3 Prioritas Pembangunan Kalimantan Selatan

Agar Pembangunan Kalimantan Selatan dalam 5 tahun kedepan dapat lebih terarah dan lebih fokus, maka ditetapkan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi acuan, yaitu :

1. Kalsel Cerdas
2. Kalsel Sehat
3. Kalsel Terampil
4. Kalsel Beriman
5. Kalsel Dengan Pemda Berkinerja Baik
6. Kalsel Berbudaya
7. Kalsel Aman
8. Kalsel Menuju Tuan Rumah PON
9. Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas
10. Kalsel Sentra Pangan
11. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional
12. Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan Dan Jasa
13. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas

### 5.4 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Selatan

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2016-2021. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Selatan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap



sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada masing-masing misi dan prioritas pembangunan sebagai berikut:

**1. Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil**

Untuk mencapai Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil dilaksanakan 4 (empat) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Cerdas, Prioritas Kalsel Sehat, Prioritas Kalsel Terampil dan Prioritas Kalsel Beriman.

Tujuan pada Misi ini :

**a. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia baik di taraf nasional maupun internasional. Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menata, mengolah dan membangun provinsi Kalimantan Selatan secara kreatif dan produktif dengan memanfaatkan potensi daerah yang berkualitas sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan. Indikator pencapaian tujuan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek ekonomi masyarakat (daya beli). Target akhir angka IPM yang ingin dicapai sampai tahun 2021 adalah sebesar 71,80 (tahun 2015 sebesar 67,63).

Guna meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Selatan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 3) Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja,
- 4) Meningkatnya pemahaman keagamaan
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender



## **2. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik**

Untuk mencapai Misi Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik dilaksanakan 1 (satu) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel dengan Pemerintah Daerah Berkinerja Baik.

Tujuan Misi ini : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator tujuan pembangunan untuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik adalah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan OPINI BPK. Target akhir yang ingin dicapai sampai tahun 2021 untuk LAKIP pada kategori A (81,01) dan Opini BPK pada Kategori WTP.

Lebih lanjut, guna mewujudkan sistem pelayanan pemerintahan yang akuntabel, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya Kualitas Layanan publik
- 2) Meningkatnya pendanaan daerah
- 3) Meningkatnya kinerja pembangunan daerah
- 4) Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Professional dan Pemerintahan Akuntabel

## **3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal**

Untuk mencapai Misi Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal dilaksanakan 3 (tiga) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Berbudaya, Prioritas Kalsel Aman, dan Prioritas Kalsel Menuju Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON).



Tujuan Misi :

**a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan suatu daerah. Pemerintah Daerah di dalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Otonomi daerah atau desentralisasi memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai, karena Pemerintah Daerah mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Indikator keberhasilan pencapaian Tujuan tersebut adalah Indeks Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan angka Kemiskinan. Target akhir yang ingin dicapai sampai tahun 2021 adalah sebesar untuk Gini Ratio 0,286 dan angka kemiskinan 3,96-4,01.

Sasaran :

- 1) Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 2) Meningkatnya ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat
- 3) Terselenggaranya PON

**b. Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasis kearifan lokal**

Budaya adalah kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang di peroleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang di dapat melalui pendidikan formal atau informal, yang berfungsi untuk mempertahankan diri (perlindungan), memperoleh kepuasan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, mengelola/memanfaatkan LH, sebagai media adaptasi terhadap lingkungan alam, berisi etika sebagai penuntun prilaku dan mengembangkan daya cipta. Dengan demikian hakekat kebudayaan adalah perwujudan dan penyaluran kepribadian manusia, yang sejak dahulu lahir dari suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, untuk itu diperlukan upaya perbaikan tingkah laku, melalui aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan tindakan–tindakan yang diijinkan. Salah satu indikator pencapaian Tujuan Pembangunan tersebut antara lain adalah persentase kejadian konflik antar suku dan agama serta persentase angka kriminalitas. Target akhir yang ingin dicapai sampai tahun 2021 Konflik



SARA nol (0) dalam arti tidak terjadi konflik. Target angka penanganan kriminalitas sebesar 50% dari kasus tahun 2.232 kasus.

Kearifan budaya lokal harus dilestarikan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Transformasi kearifan budaya lokal yang dikaji secara multi disiplin dan transdisiplin dapat dikembangkan dan diterapkan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Sasaran :

- 1) Meningkatkan ketahanan budaya
- 2) Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian
- 3) Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama
- 4) Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat

#### **4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya**

Untuk mencapai Misi Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya dilaksanakan 1 (satu) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel dengan infrastruktur yang berkualitas.

Tujuan pada Misi ini: **Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang.**

Keberhasilan pembangunan sangat berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus menciptakan kebijakan pembangunan yang tepat dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan. Peningkatan laju ekonomi tidak selalu dibarengi dengan pemerataan. Kemiskinan tidak dapat dihilangkan dengan hanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut tidak lepas dari peran infrastruktur sebagai katalisator baik percepatan pembangunan perekonomian maupun pembangunan sosial yang bersifat pemerataan keseluruhan wilayah. Dengan keberadaan pembangunan infrastruktur diharapkan mendukung secara fisik terhadap pembangunan sektor lainnya. Indikator pencapaian Tujuan Pembangunan tersebut adalah indeks





pelayanan Infrastruktur dasar. Target akhir yang ingin dicapai sampai tahun 2021 sebesar 100% dari kondisi awal sebesar 31,16 % (2014/2015).

Lebih lanjut, guna mewujudkan pemerataan pembangunan seluruh wilayah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar

Sasaran ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang harus tersedia disetiap individu masyarakat, seperti ketersediaan air minum, ketersediaan prasarana sanitasi, ketersediaan listrik masyarakat, dan ketersediaan telekomunikasi.

2) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian

Sasaran ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian seperti ketersediaan sarana prasarana konektivitas antar wilayah, ketersediaan tampungan air dan ketersediaan pembangkit listrik yang memadai.

**5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan**

Untuk mencapai Misi Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan yang dilaksanakan dengan 4 (empat) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Sentra Pangan, Prioritas Kalsel Menuju Salah satu Destinasi Wisata Nasional, Prioritas Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa, dan Prioritas Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas.

Tujuan Misi ini:

**a. Meningkatkan daya saing Perekonomian**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan daerah disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini, menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global. Masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi menjadi tujuan yang tidak



terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. Untuk meningkatkan kualitas daya saing perekonomian masyarakat yang berkelanjutan maka perlu untuk dilakukan penggalangan partisipasi masyarakat secara aktif dan membuka pintu kemitraan yang berbasis “*win-win solution*”. Indikator pencapaian Tujuan Pembangunan tersebut adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah). Target akhir yang ingin dicapai sampai tahun 2021 adalah sebesar 4,5 – 5,03. Target realisasi nilai Investasi PMA dan PMDN sebesar 12 Triliun Rupiah dari kondisi awal sebesar 5,4 Triliun Rupiah.

Sasaran:

- 1) Terwujudnya Mandiri Pangan
- 2) Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian
- 3) Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa
- 4) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata
- 5) Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian

#### **b. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**

Tidak dapat dipungkiri, lingkungan yang sehat dan asri merupakan dambaan bagi semua orang. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Komponen-komponen di dalam lingkungan hidup yang membentuk suatu sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Suatu ekosistem akan menjamin keberlangsungan kehidupan apabila lingkungan itu dapat mencukupi kebutuhan minimum dari kebutuhan organisme. Lebih lanjut, guna mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan asri maka sasaran yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator Tujuan Pembangunan tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target akhir yang ingin dicapai sampai tahun 2021 adalah sebesar 65 point dari kondisi awal 2014 sebesar 55,86 point.



## BAB V – Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 5.1, Adapun sasaran pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 tersaji pada Tabel 5.1.



BAB V – Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

**Tabel 5. 1 Sasaran Pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021**

**Visi: Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing**

Visi: Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing									
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN TAHUN KE-					TARGET AKHIR
			2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil Prioritas : Kalsel Cerdas, Kalsel Sehat, Kalsel Terampil dan Kalsel Agamis.									
Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	SD/MI/Paket A	108,81	108,12	108,03	107,98	107,95	107,93	107,92
		SMP/MTs/Paket B	79,52	79,70	79,73	79,74	79,75	79,75	79,75
		SMU/MA/SMK/Paket C	62,14	64,32	65,06	65,42	65,85	66,25	66,63
		SD/MI/Paket A	96,74	97,224	97,335	97,439	97,540	97,643	97,744
		SMP/MTs/Paket B	69,57	74,268	75,886	77,516	79,153	80,796	82,442
		SMU/MA/SMK/Paket C	50,05	57,491	60,032	62,589	65,155	67,728	70,306
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu/1.000 KH	188 (2013)	170	150	135	120	108	90
		Angka Kematian Bayi/100.000 KH	43 (2013)	40	37	33	30	27	24
		AKABA	35 (2013)	30.	27	25	20	17	15
		Balita Gizi Buruk	8,20	7,60	7,40	7,29	6,00	5,29	5,00
		Balita Gizi Kurang	19,20	18,77	18,50	18,25	18,00	17,25	16,00
	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	69,31 (2013)	69,72	69,91	70,07	70,22	70,34	70,46
	Meningkatnya Pemahaman Keagamaan	Persentasi Lulusan SMA/MA yang beragama islam khatam Al-Quran	0	10	20	30	40	50	70
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian	42,24	44,00	44,25	44,50	44,75	5,00	4,75
		Unmeed Need	10,5	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	5
Misi Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik Prioritas : Kalsel dengan Pemerintahan Daerah Berkinerja Baik									
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,38	76	78,13	79,5	80,88	82,25	83,63
	Meningkatnya Pendanaan Daerah	Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD)	53,24	56,32	58,37	58,33	58,31	58,28	58,95



## BAB V – Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi: Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing									
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN TAHUN KE-					TARGET AKHIR
			2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Tercapainya Sasaran Pembangunan Jangka Menengah	0%	20%	40%	60%	80%	90%
	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		LAKIP	BB 76,3	BB 78,52	BB 78,66	A 80,26	A 80,55	A 80,56	A 81,01
Misi Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal									
Prioritas : Kalsel Berbudaya, Kalsel Menuju PON, Kalsel Aman									
Meningkatkan kesejahteraan Sosial masyarakat	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Angka PMKS	194,623	0,39% 193,864	0,39% 193,108	0,39% 192,395	0,39% 192,395	0,39% 190,898	0,39% 190,154
	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, perlindungan masyarakat	Konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0
	Terselenggaranya PON	Terbangunnya <i>sport center</i>	5%	25%	45%	60%	80%	90%	100%
Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian	Perubahan perilaku menuju positif	0	0	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif
	Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama	Konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0
	• Meningkatkan ketahanan budaya • Meningkatkan Kualitas Budaya Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas seni dan budaya	10%	13%	16%	19%	22%	25%	28%
Misi Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya									
Prioritas : Kalsel Kalsel Dengan Infrastruktur yang Berkualitas									
Meningkatkan penyediaan dan pemerataan	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	31,16	42,63	54,11	65,58	77,05	88,53	100



## BAB V – Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi: Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing									
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN TAHUN KE-					TARGET AKHIR
			2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian	Persentase Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Strategis	44,4	55,63	66,87	78,10	89,33	93,41	97,50
<b>Misi Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan</b> <b>Prioritas : Kalsel Sentra Pangan, Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional, Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan, dan Jasa, Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas.</b>									
Meningkatkan daya saing Perekonomian	Terwujudnya Mandiri Pangan	Produksi : - Beras - Daging - Ikan	1.249.716 66.772 364.395	1.287.208 68.144 383.000	1.325.824 71.551 389.000	1.365.599 75.129 395.000	1.406.567 78.885 401.000	1.448.764 82.829 408.000	1.576.839 85.738 418.000
	Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian	LPE Pertanian**	3,7*	4	4	4	4	4	4
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa	LPE Industri**	3,6*	4	4	4	4	4	4,5
		LPE Perdagangan**	8,2*	8	8	8	8	8	8
		LPE Jasa**	6,9*	10	10	10	10	10	10
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata	6,5*	6,7	6,8	7,0	7,2	7,4	7,5
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian	Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	5,4	7,1	8,1	9,2	10,5	12	12
		Indeks Tutupan Lahan	43,66	44	44,5	45	45,5	46	46
		Indeks Kualitas Udara	81,87	83	85	87	88	89	89
		Indeks Kualitas Air	46,16	58	58,5	59	59,5	60	60
		Luas Genangan Banjir (ha)	23.986	22.787	21.587	20.388	19.189	17.990	16.790



### 5.5 Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan

Pencapaian sasaran pembangunan provinsi pada dasarnya adalah agregasi dari keberhasilan pembangunan dari pemerintah provinsi (termasuk Perangkat Daerah) dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan. Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, serta memperhitungkan distribusi PDRB, penduduk miskin, dan jumlah pengangguran, maka target pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021 untuk indikator daerah adalah sebagai berikut.

#### a. Target Peningkatan IPM Kabupaten/Kota

Target peningkatan IPM Kabupaten/Kota dalam lima tahun mendatang disusun dengan memperhitungkan asumsi trend kenaikan nilai IPM menurut komponen pembentuk IPM tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 5.2.

**Tabel 5.2** Target Peningkatan IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021

Kabupaten/ Kota	Kondisi Awal	Proyeksi IPM					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Tanah Laut	67,06	67,62	68,18	68,75	69,31	69,87	70,43
2 Kotabaru	66,28	66,80	67,32	67,85	68,37	68,89	69,41
3 Banjar	66,23	66,75	67,27	67,80	68,32	68,84	69,36
4 Barito Kuala	63,17	63,78	64,39	65,01	65,62	66,23	66,84
5 Tapin	67,67	68,35	69,03	69,72	70,40	71,08	71,76
6 HSS	66,08	66,91	67,74	68,58	69,41	70,24	71,07
7 HST	66,28	67,19	68,10	69,02	69,93	70,84	71,75
8 HSU	62,04	62,76	63,48	64,21	64,93	65,65	66,37
9 Tabalong	68,81	69,26	69,71	70,17	70,62	71,07	71,52
10 Tanah Bumbu	67,54	68,14	68,74	69,35	69,95	70,55	71,15
11 Balangan	65,02	65,60	66,18	66,77	67,35	67,93	68,51
12 Banjarmasin	75,46	75,98	76,50	77,03	77,55	78,07	78,59
13 Banjarbaru	77,71	78,11	78,52	78,93	79,33	79,74	80,14
<b>Kalimantan Selatan</b>	67,63	68,88	69,50	70,13	70,75	71,38	71,0-71,8

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada tabel 5.2 dapat diketahui bahwa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya adalah Banjarbaru, Banjarmasin dan Tabalong. Ketiga kabupaten/kota tersebut memiliki besaran IPM 77,71 untuk Banjarbaru, 75,46 untuk Banjarmasin dan 68,81



untuk Tabalong. Ketiga kabupaten/kota tersebut memiliki target peningkatan IPM pada tahun 2021 sebesar 79,74 (Banjarbaru), 78,07 (Banjarmasin) dan 71,07 (Tabalong). Sedangkan, untuk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang memiliki IPM paling rendah adalah Hulu Sungai Utara dengan IPM sebesar 62,04 yang memiliki target IPM pada tahun 2021 sebesar 65,65.

#### b. Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota dalam lima tahun mendatang disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021;
- (2) Distribusi PDRB menurut Kabupaten/Kota; dan
- (3) Kinerja pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2010-2015.

**Tabel 5.3** Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Kabupaten/ Kota	Esti- masi	Perkiraan					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Tanah Laut	5,53	5,57	5,62	5,63	5,68	5,72	5,77
2. Kota Baru	5,24	5,28	5,33	5,33	5,38	5,43	5,48
3. Banjar	5,12	5,16	5,21	5,21	5,26	5,31	5,36
4. Barito Kuala	4,50	4,54	4,59	4,59	4,64	4,69	4,74
5. Tapin	5,52	5,56	5,61	5,61	5,66	5,71	5,76
6. Hulu Sungai Selatan	5,84	5,88	5,93	5,93	5,98	6,03	6,08
7. Hulu Sungai Tengah	5,61	5,65	5,70	5,70	5,75	5,80	5,85
8. Hulu Sungai Utara	6,04	6,08	6,13	6,13	6,18	6,23	6,28
9. Tabalong	4,40	4,44	4,49	4,49	4,54	4,59	4,64
10. Tanah Bumbu	3,67	3,71	3,76	3,76	3,81	3,86	3,91
11. Balangan	6,27	6,31	6,36	6,36	6,41	6,46	6,51
12. Kota Banjarmasin	6,29	6,33	6,38	6,38	6,43	6,48	6,52
13. Kota Banjar Baru	6,69	6,73	6,78	6,78	6,83	6,88	6,92
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>3,84</b>	<b>3.28 - 3.78</b>	<b>3.53 - 4.03</b>	<b>3.78 - 4.28</b>	<b>4.03 - 4.53</b>	<b>4.28 - 4.78</b>	<b>4.50 - 5.03</b>

Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten diatas Kalimantan diproyeksikan tumbuh dengan target akhir di Tahun 2021 sebesar 4.50%-5.03%. Distribusi pertumbuhan tertinggi berada di Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa. Sedangkan proyeksi pertumbuhan terendah berada di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Bumbu karena kedua daerah ini struktur ekonomi yang bertumpu pada





pertambangan akan dilakukan shifting struktur dan kondisi pertambangan yang lesu. (lihat Tabel 5.3).

### c. Target Peningkatan Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021

Target Peningkatan Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota 2016-2021 disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021;
- (2) Distribusi tenaga kerja menurut Kabupaten/Kota tidak berubah; dan
- (3) Pertumbuhan angkatan kerja baru menurut kabupaten/kota tahun 2010-2015.

Dengan terbukanya kesempatan kerja diharapkan akan menurunkan angka pengangguran di Kalimantan Selatan. Berikut merupakan proyeksi angka pengangguran di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

**Tabel 5. 4** Target Pengangguran Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Kabupaten/ Kota	Esti- masi	Perkiraan					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Tanah Laut	3,96	4,09	4,06	4,03	3,99	3,94	3,88
2. Kota Baru	4,67	4,60	4,52	4,44	4,35	4,24	4,13
3. Banjar	2,68	2,64	2,65	2,62	2,59	2,55	2,52
4. Barito Kuala	3,31	3,28	3,24	3,19	3,13	3,07	2,99
5. Tapin	5,49	5,50	5,48	5,46	5,42	5,37	5,32
6. Hulu Sungai Selatan	4,82	4,77	4,72	4,57	4,41	4,24	4,07
7. Hulu Sungai Tengah	2,77	2,82	2,86	2,85	2,83	2,75	2,67
8. Hulu Sungai Utara	3,20	3,25	3,17	3,17	3,16	3,14	3,11
9. Tabalong	2,63	2,81	2,76	2,71	2,66	2,59	2,51
10. Tanah Bumbu	7,43	7,42	7,40	7,38	7,35	7,30	7,23
11. Balangan	3,09	3,18	3,11	3,03	2,95	2,85	2,75
12. Kota Banjarmasin	5,26	5,36	5,32	5,29	5,25	5,20	5,14
13. Kota Banjar Baru	2,91	3,01	2,89	2,76	2,62	2,48	2,33
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>4,83</b>	<b>4,80 – 4,78</b>	<b>4,77 – 4,71</b>	<b>4,70 – 4,50</b>	<b>4,25 – 4,20</b>	<b>4,10 – 4,03</b>	<b>3,60 – 4,00</b>

Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi adalah Tanah Bumbu (7,43) yang diproyeksikan pada tahun 2021 menurun menjadi 7,23, Kota Banjarmasin Tabalong (5,26) yang diproyeksikan turun menjadi 5,14.

Peningkatan Kesempatan Kerja adalah bentuk upaya penciptaan lapangan kerja yang didorong oleh peningkatan investasi baik oleh



Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat sendiri. Dorongan akan tercipta apabila didukung oleh kebijakan pengelolaan perekonomian yang berimbang antara daya dukung lingkungan dan kemampuan karya dan cipta SDM yang memadai. (lihat Tabel 5.4).

**d. Target Pengurangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021**

Target pengurangan kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2021 disusun dengan memperhitungkan asumsi sebagai berikut:

- (1) Target penurunan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021;
- (2) Distribusi penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota.
- (3) Kinerja pengurangan kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2010-2015.

**Tabel 5.5** Target Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Kabupaten/ Kota	Esti- masi	Perkiraan					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Tanah Laut	4,22	4,10	4,00	3,90	3,80	3,70	3,61
2. Kota Baru	4,24	4,02	3,80	3,60	3,40	3,22	3,05
3. Banjar	2,68	2,60	2,53	2,45	2,38	2,31	2,25
4. Barito Kuala	4,80	4,64	4,48	4,33	4,18	4,04	3,90
5. Tapin	3,21	3,11	3,03	2,94	2,86	2,78	2,70
6. Hulu Sungai Selatan	6,39	6,26	6,13	6,00	5,88	5,75	5,63
7. Hulu Sungai Tengah	5,14	4,93	4,72	4,52	4,33	4,15	3,97
8. Hulu Sungai Utara	6,28	5,98	5,69	5,42	5,16	4,91	4,67
9. Tabalong	5,80	5,64	5,47	5,32	5,16	5,01	4,87
10. Tanah Bumbu	4,72	4,52	4,33	4,14	3,97	3,80	3,64
11. Balangan	5,74	5,53	5,33	5,13	4,95	4,77	4,59
12. Kota Banjarmasin	3,84	3,65	3,48	3,31	3,15	3,00	2,86
13. Kota Banjar Baru	4,14	4,00	3,85	3,72	3,59	3,46	3,34
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>4,72</b>	<b>4,68 – 4,66</b>	<b>4,65 – 4,55</b>	<b>4,50 – 4,30</b>	<b>4,25 – 4,05</b>	<b>4,03 – 4,02</b>	<b>3,96 – 4,01</b>

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi adalah



Hulu Sungai Utara (6,28), Hulu Sungai Selatan (6,53) dan Tabalong (5,98). Ketiga kabupaten/kota tersebut memiliki target penurunan kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 4,67 (Hulu Sungai Utara), 5,63 (Hulu Sungai Selatan) dan 4,87 (Tabalong). (lihat Tabel 5.5).

**e. Target Penurunan Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021**

Indeks gini merupakan sebuah indikator pembangunan yang mengukur ketimpangan pendapatan. Saat ini indeks gini Kalimantan selatan sebesar 0,328 yang berada pada kategori sedang. Dalam lima tahun kedepan diharapkan Indeks Gini Kalimantan Selatan diharapkan berada di kategori rendah yang memiliki kisaran antara 0-0,3 yang memiliki arti bahwa pembangunan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan. Tabel 5.6 adalah Target Indeks Gini Kota Kabupaten di Kalimantan Selatan tahun 2016-2021

**Tabel 5. 6** Indeks Gini Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota	Kondisi Awal	Proyeksi Indeks Gini					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Tanah Laut	0,253	0,244	0,236	0,227	0,219	0,210	0,201
2. Kotabaru	0,313	0,304	0,296	0,287	0,279	0,270	0,261
3. Banjar	0,313	0,304	0,296	0,287	0,279	0,270	0,261
4. Barito Kuala	0,313	0,304	0,296	0,287	0,279	0,270	0,261
5. Tapin	0,263	0,254	0,246	0,237	0,229	0,220	0,211
6. HSU	0,243	0,234	0,226	0,217	0,209	0,200	0,191
7. HST	0,283	0,274	0,266	0,257	0,249	0,240	0,231
8. HSS	0,243	0,234	0,226	0,217	0,209	0,200	0,191
9. Tabalong	0,313	0,304	0,296	0,287	0,279	0,270	0,261
10. Tanah Bumbu	0,313	0,304	0,296	0,287	0,279	0,270	0,261
11. Balangan	0,283	0,274	0,266	0,257	0,249	0,240	0,231
12. Banjarmasin	0,353	0,344	0,336	0,327	0,319	0,310	0,301
13. Banjarbaru	0,343	0,334	0,326	0,317	0,309	0,300	0,291
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>0,359</b>	<b>0,328</b>	<b>0,317</b>	<b>0,307</b>	<b>0,296</b>	<b>0,286</b>	<b>0,286</b>

Kabupaten/kota di kalimantan Selatan yang memiliki ketimpangan pendapatan terbesar/memiliki indeks gini dengan kategori sedang adalah Kota Banjarmasin (0,353), Kota Banjarbaru (0,343) serta Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki indeks gini yang sama yaitu 0,313. Diharapkan dalam lima tahun kedepan indeks Gini Kota/Kabupaten dalam pembangunan menghasilkan nilai indeks gini dibawah 0,30 yang merupakan kategori ketimpangan rendah.